







Drs. H. ISMAIL, M.M.

# Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) **KABUPATEN MEMPAWAH**

**TAHUN ANGGARAN 2023** 

Indeks Pembangunan Manusia

Tahun 66,94 2022

Tahun 2023

67.92

Angka Kemiskinan

5,32%

5,21%

**Angka Pengangguran** 

TAHUN 2022 7,48%

7,33%

# Indikator Kinerja Kunci Hasil

# Pendidikan

FEHIULIKAII
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan mene
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidkan dasar
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Resenatan	
Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,32 %
Persentase RS rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi	100,00 %
Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	93,14 %
Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelanan persalinan	93,52 %
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	98,28 %
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	83,71 %
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	84,55 %
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	85,38 %
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,46 %
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65,09 %
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93,28 %
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	75,92 %
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	65,95 %
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	111,12 %

rekerjaan omum dan renataan kuang	
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	14,09 %
Kewenangan Kab/Kota	
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	63,63 %
infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	25,45 %
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	73,41 %
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	86,73 %
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	61,07 %
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	60,94 %
Rasio tenaga operator / teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	4,04 %
Paeio provek vang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kenetruksi	100.96

### Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	0
kabupaten/kota	
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,72 %
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	16.91 %

#### Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol PP)	
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,39 menit
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	82,60 %
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0,08 %
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	69,48 %

0130111030	Gangguan	mantibum yai	ig dapat diselesaikali
Persentase	Perda dan	Perkada yang	ditegakkan

# Sosial

Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) Persentase korban bencana laim dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setela tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

71.65 %	
100 %	

# **Pendapatan**



### Polania

Delalija		
	Belanja Operasi	Rp 779.385.911.181,43
	Belanja Modal	Rp 187.018.785.659,00
	Belanja Tidak Terduga	Rp 2.317.401.932,00
	Belanja Transfer	Rp 127.078.417.600,00
	Total Belanja	Rp 1.095.800.516.372,43

# Ketimpangan Pendapatan

Tahun 0,302 2022

Tahun 2023

0,291

Pertumbuhan Ekonomi

TAHUN 2022 4,70% 5,09% Pendapatan Per-Kapita

**TAHUN 2023 TAHUN 2022 32.239** 

# Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

# Perencanaan dan Keuangan

13,89 % Level 3 Level 3 67,79 %

### Pengadaan

Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Rasio nilal belanja yang dilakukan melalui pengadaan Peningikatan produk dalam negeri dan dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksan pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah

#### Kepegawaian

. •
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah /Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

# Manajemen Keuangan

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

Transparansi dan Partisipasi Publik

Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanar Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

### Prestasi dan Penghargaan

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021. Ini Merupakan Opini WTP yang Keenam Kalinya.

Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2021, dengan Predikat B dari kementerian PAN RB RI

Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, dengan Nilai 94,81 dari Kementeriann PAN RB RI

Penghargaan Pemberian Tanda Mata Kepada Pemerintah Daerah / Peme Kepedulian Terhadap Pendidikan Agama Islam dari Kementerian Agama RI

Pengelola DAK Fisik Terbaik Tahun 2021, Peringkat 2 dari Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Kantor Wilayah Provinsi Kalbar.

Penghargaan Juara Umum MTQ ke-XXX Tingkat Provinsi Kalimantan Barat

Piagam Penghargaan PPID (Pejabar Pengelola Informasi dan Dokumentasi), Keterbukaan rmasi Publik se-Kalimantan Barat Sebagai Peringkat ke-3 dari Komisi Informasi (KI) Pusat

# PENJABAT BUPATI MEMPAWAH



Drs. H. Ismail, M.M.